

**STRATEGI PENGUATAN DOMAIN PARTISIPASI DAN  
KEPEMIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN PEMUDA DI KOTA SUKABUMI**

*Strategy For Strengthening Participation And Leadership Domain In The  
Implementation Of Youth Development Policy In Sukabumi City*

<sup>1</sup>Rika Mustikawati, <sup>2</sup>Noorsyamsya Djumara, <sup>3</sup>Nita Nurliawati

<sup>1,2,3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

<sup>1</sup>rikahadian13@gmail.com, <sup>2</sup>noorsyamsa.dj@gmail.com, <sup>3</sup>nitanurliawati@yahoo.com

**INFORMASI  
ARTIKEL**

**ABSTRAK**

*Article history :*

Dikirim :

19 April 2022

Revisi Pertama :

03-06-2022

Diterima :

22-06-2022

**Kata Kunci :**

pembangunan pemuda,  
partisipasi dan  
kepemimpinan,  
implementasi kebijakan

**Keywords :**

youth development,  
participation and  
leadership, policy  
implementation

Penelitian ini difokuskan pada penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan pemuda, faktor penyebab rendahnya domain partisipasi dan kepemimpinan, dan untuk mengetahui strategi apa yang paling tepat untuk penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis SWOT untuk mengungkapkan secara jelas fenomena dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi. Data dihimpun melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang terhimpun dianalisis dan diolah untuk menghasilkan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi belum optimal karena belum mencapai kelurahan. Sumber daya manusia sudah mencukupi dari segi jumlah, tapi belum memadai dari segi kompetensi, alokasi anggaran untuk kepemudaan masih sangat kecil, namun memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sikap para implementor baik dan mendukung terlaksananya kebijakan pembangunan pemuda, dan struktur birokrasi memiliki fragmentasi. Dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi diketahui bahwa penyebab rendahnya domain partisipasi dan kepemimpinan yaitu, batasan usia pemuda 16-30 tahun belum optimal diterapkan di organisasi kepemudaan, kurangnya media komunikasi yang mudah diakses oleh pemuda, pemerintah belum maksimal menyediakan ruang untuk pemuda berpartisipasi dalam rapat kemasyarakatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan koordinat analisis internal 0,21 dan koordinat analisis eksternal 0,31 sehingga strategi yang direkomendasikan berada pada kuadran 1 yaitu merumuskan kegiatan yang mendorong pemuda

---

dalam berpartisipasi, kolaborasi antar pemuda dan perangkat daerah, koordinasi dengan organisasi kepemudaan dalam penguatan kelembagaan.

#### Abstract

*This research is focused on strengthening the domain of participation and leadership in the implementation of youth development policies in Sukabumi City. Aims to find out how the implementation of youth development policies, the factors causing the low participation and leadership domain, and furthermore to find out what strategies are most appropriate for strengthening the participation and leadership domains. This study uses qualitative methods and SWOT analysis to clearly reveal the phenomena in the implementation of youth development policies in Sukabumi City. Data were collected through documentation studies, observations, and interviews. The collected data is analyzed and processed to produce a strategy. The results showed that the communication process was not optimal because it had not yet reached the villages. Human resources are sufficient in terms of numbers but not adequate in term of competence, budget allocation for youth is still very small, but has adequate facilities and infrastructure. The attitude of the implementors is good and supports the implementation of youth development policies, and the bureaucratic structure has fragmentation. From the results of interviews, documentation studies, and observations, it is known that the causes of low participation and leadership domains namely, the age limit 16-30 years of youth has not been optimally applied in youth organizations, youth lack access to youth information, and the government has not maximally provided space for youth to participate in meetings. The analysis was carried out using SWOT analysis with internal analysis coordinates 0,21 and external analysis coordinates 0,31 so that the recommended strategy is in quadrat 1 (one), namely formulating activities that encourage youth to participate, collaboration between youth and regional officials, coordination with youth organizations in institutional strengthening.*

---

## A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Sejarah telah menyebutkan bahwa peran pemuda dalam pembangunan tidak bisa diabaikan. Bahkan, pemuda merupakan ujung tombak pembangunan tersebut. Bangsa Indonesia pun mendapatkan kemerdekaan berkat perjuangan dan pergerakan pemudanya. Pemuda merupakan ikon perubahan zaman. Hampir di setiap perubahan cenderung didominasi oleh aktivitas pergerakan kelompok pemuda.

Pemuda dalam pengertian awal merujuk pada kelompok usia demografi. Akan tetapi, kelompok usia demografi ini oleh lembaga dan organisasi yang berbeda didefinisikan secara berbeda. Khusus dalam lingkup Negara Indonesia, secara formal menetapkan batasan pemuda seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 adalah penduduk berusia antara 16 hingga 30 tahun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) lebih sering menyajikan kelompok usia 15-29 tahun, yang terbagi menjadi 15-19, 20-24, dan 25-29 tahun sebagai garis batas demografi konvensi umum. Badan

Pusat Statistik dalam rangka mengulas kondisi pemuda Indonesia, telah menerbitkan statistik pemuda yang secara khusus merujuk pada ketetapan UU 40/2009.

Berdasarkan data BPS tahun 2020 sebanyak 67,65 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pemuda. Demikian juga Kota Sukabumi pada tahun 2020 memiliki jumlah pemuda sebesar 86.875 jiwa atau seperempat dari seluruh penduduk Kota Sukabumi. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa, serta memanfaatkan peluang demografi.

Kerangka umum (*grand design*) pembangunan nasional kepemudaan dituangkan dalam RPJPN sebagai prioritas pembangunan pemuda. Dalam *grand design* tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Pembangunan kepemudaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan pemuda diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan pemuda, indeks ini merupakan instrumen yang sangat penting. IPP dapat menggambarkan dan memetakan kemajuan pembangunan kepemudaan berbasis *outcome* tingkat daerah dan nasional. IPP telah dihitung sejak tahun 2015, yang kemudian di tegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagai salah satu amanatnya. Berikut adalah perkembangan IPP Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi dari tahun 2015-2019.

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Pemuda Nasional dan Prov. Jabar Tahun 2015-2019**

IPP/TAHUN	NASIONAL	PROV. JABAR	KOTA SUKABUMI
2015	47.33	44.50	NA
2016	50.17	46.33	NA
2017	48.00	44.33	NA
2018	50.17	45.50	NA
2019	51.50	48.16	49.95

Sumber: Laporan IPP Kota Sukabumi tahun 2019

IPP merupakan salah satu indeks kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Target IPP Kota Sukabumi telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai IKU dalam pembangunan pemuda seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Target Indeks Pembangunan Pemuda dalam RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi**

Tahun	Target	Realisasi
2019	53,63	49,95
2020	54,13	51,90

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa capaian target IPP tahun 2019 sebesar 49,95 yaitu 93,14% dari target yang ditetapkan. Persentase capaian ini walaupun terlihat tinggi, akan tetapi tetap tidak memenuhi target yang sudah ditentukan dalam RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi. Sedangkan pada tahun 2020 IPP Kota Sukabumi mencapai angka 51,90 yang berarti masih tetap belum mencapai target RPJMD.

IPP terdiri dari 5 domain dan 15 indikator, nilai masing-masing domain pada IPP Kota Sukabumi, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Nilai Domain pada IPP Kota Sukabumi Tahun 2019**

Domain	IPP Kota Sukabumi
Pendidikan	60,67
Kesehatan dan Kesejahteraan	62,25
Ketenagakerjaan dan Kesempatan	44,5
Partisipasi dan Kepemimpinan	32
Gender dan Diskriminasi	50,33
<b>IPP</b>	<b>49,95</b>

**Sumber: Laporan IPP Kota Sukabumi Tahun 2019**

Tabel 3 menunjukkan data hasil survey dan analisa sehingga diperoleh nilai IPP sebesar 49,95. Hasil survey menunjukkan bahwa capaian nilai terendah pada IPP Kota Sukabumi ada pada domain partisipasi dan kepemimpinan yaitu sebesar 32. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki 3 indikator yaitu partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (24,69), partisipasi pemuda dalam organisasi (32), dan pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan (0,07). Ketiga indikator ini dihitung berdasarkan partisipasi pemuda dalam lingkup pemuda berdasarkan batasan usia dalam UU No.40 tahun 2009, yaitu 16-30 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa partisipasi dan kepemimpinan pemuda Kota Sukabumi masih rendah sehingga penulis memandang perlu untuk meneliti tentang Strategi Penguatan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pemuda di Kota Sukabumi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi, menganalisis penyebab rendahnya domain partisipasi dan kepemimpinan di Kota Sukabumi, menyusun strategi penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan di Kota Sukabumi.

## **B. METODE/METHOD**

Dalam studi implementasi kebijakan, metodologi penelitian merupakan suatu bagian penting dalam menentukan keabsahan sebuah penelitian. Penggunaan metodologi merupakan langkah yang harus ditempuh agar dapat menjawab masalah. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif.

#### a. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian disebut informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi-informasi terkait substansi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Pemuda DISPORA, Kepala Pelaksana BPBD, Kasie. Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial), Lurah di Kota Sukabumi, dan Organisasi Kepemudaan.

#### b. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Satori dan Komariah (2008 : 79-86), yaitu sebagai berikut pengamatan (Observasi), wawancara, dan telaah dokumen.

#### c. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan. Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan data melalui: perpanjangan pengamatan, triangulasi *member check*, dan *Peer debrief*.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Lokasi penelitian adalah wilayah administrasi Kota Sukabumi. Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Daerah terbagi dalam 5 (lima) [kecamatan](#) dan 33 (tiga puluh tiga) [kelurahan](#). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum.

Jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2020 tercatat sebanyak 351.459 jiwa dan seperempatnya adalah pemuda. Pembangunan pemuda telah ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis dalam perencanaan baik itu nasional, provinsi, dan kota. Beberapa perbedaan dan persamaan dalam perencanaan pembangunan pemuda sebagai berikut.

**Tabel 4. Tabel Perbandingan Perencanaan Dan Regulasi Pembangunan Pemuda**

Perencanaan dan Regulasi Pembangunan Pemuda		
Perbandingan RPJMN, RPJMD Prov. Jabar, dan RPJMD Kota Sukabumi	Perbandingan regulasi pembangunan pemuda	Perbandingan regulasi koordinasi lintas sektor
Kesamaan:	Perbedaan:	Perbedaan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>mengarah pada pembangunan manusia, peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta menggunakan IPP sebagai indikator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.40 Th 2009 membahas tentang Koordinasi dan Kemitraan, sedangkan Perda Prov. Jabar No.8 th 2016 dan Perda Kota Sukabumi No.9 th 2015 membahas tentang kemitraan saja.</li> <li>Perda Prov. Jabar No.8 th 2016, membahas tentang lembaga permodalan kewirausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Sukabumi belum memiliki regulasi koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan</li> </ul>

**Sumber: diolah oleh peneliti, 2021**

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan kepemudaan baik itu ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kota. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka menjapai tujuan yang sama dan dampak yang diharapkan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diuji dengan berbagai macam teori implementasi kebijakan, salah satunya adalah teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Model pendekatan menggunakan 4 variabel krusial sebagai alat untuk menguji keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adapun keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi. Variable-variabel tersebut harus bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua variabel tersebut secara bersamaan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III untuk melihat peran pemerintah dalam penguatan nilai partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan di Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian ini dilihat dari 4 variabel Edward III sebagai berikut.

d. Komunikasi

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi diperoleh data bahwa proses komunikasi dari formulator ke implementor telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari diimplementasikannya IPP sebagai salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak sudah berjalan namun belum optimal karena belum mencapai kelurahan-kelurahan dan aspek kejelasan serta konsistensi masih belum tercapai. Terjadinya pandemik covid-19 juga menjadi sebab proses komunikasi tidak optimal.

e. Sumberdaya

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi diperoleh data bahwa sumberdaya manusia pelaksana kebijakan dari segi jumlah sudah cukup memadai. Sedangkan dari kompetensi masih kurang terlebih untuk urusan kepemudaan masih jarang pelatihan-pelatihan untuk pelaksana kebijakan. Penambahan pengetahuan dan peningkatan kompetensi biasanya didapat dari sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pusat dan provinsi serta belajar dari pengalaman.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi diperoleh data bahwa anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan kepemudaan sangat terbatas. Dengan cakupan yang luas anggaran program kepemudaan pada tahun 2019 sebesar 0,51% dari total anggaran belanja langsung dan 19% nya merupakan anggaran partisipasi pemuda. pada tahun 2020 sebesar 0,42% dari total anggaran belanja langsung dan anggaran partisipasi pemuda sebesar 24% dari total anggaran kepemudaan merupakan jumlah yang terbilang kecil.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dapat disimpulkan bahwa sumberdaya sarana dan prasarana bagi pemuda di Kota Sukabumi sudah cukup memadai, semua gedung dan fasilitas lainnya milik pemerintah Kota Sukabumi dapat digunakan untuk kegiatan pemuda.

Berdasarkan hasil perolehan informasi diperoleh data bahwa dari sisi kewenangan perangkat daerah dan kelurahan sudah sesuai dengan tupoksinya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa urusan kepemudaan merupakan urusan lintas sektor yang harus dikerjakan dari berbagai sektor. Untuk itu perlu adanya regulasi yang mengatur koordinasi lintas sektor dan pembentukan tim koordinasi sesuai dengan amatan Perpres No.66 tahun 2017 tentang Koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan.

f. Sikap/disposisi

Menurut Edward III faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam disposisi ini ada 2 (dua), yaitu; pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi, kepala daerah telah tepat mengangkat personil di bidangnya masing-masing karena mereka siap dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Insentif, masing-masing pegawai telah menerima tunjangan kinerja untuk menjalankan tupoksi mereka.

g. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil mengumpulkan informasi diperoleh data bahwa urusan kepemudaan memiliki dimensi fragmentasi sehingga perlu adanya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya. Seperti yang diamanatkan dalam Perpres No. 66 tahun 2017 tentang Koordinasi startegis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Untuk menjalankan koordinasi lintas sektor diperlukan tim koordinasi dan ditetapkan dengan perwal. Kemudian, dirumuskan SOP sebagai panduan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan ini.

Penelitian ini juga mencari tahu apa yang menjadi penyebab rendahnya nilai domain partisipasi dan kepemimpinan. Dari hasil wawancara yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti diketahui penyebab rendahnya domain partisipasi dan kepemimpinan adalah sebagai berikut, potensi dan motivasi pemuda dalam berorganisasi sudah cukup tinggi, namun batasan usia pemuda dalam UU No.40 tahun 2009 yaitu 16-30 tahun menjadikan potensi tersebut tidak dapat dihitung sebagai partisipasi secara utuh, hanya 28% dari OKP yang terbentuk yang dapat dihitung sebagai partisipasi pemuda dalam berorganisasi; potensi dan minat pemuda untuk terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan sudah cukup tinggi, namun perlu adanya media komunikasi yang mudah diakses oleh pemuda; pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan masih terbatas pada kegiatan musrenbang kelurahan. Pemerintah belum secara maksimal menyediakan ruang bagi para pemuda untuk menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi yang tepat dalam memformulasi strategi penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi. Analisis SWOT digunakan oleh penulis sebagai alat untuk merumuskan formulasi strategi yang terbaik.

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasidan memalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingindicapai. Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis SWOT adalah memahami seluruh informasi dalam suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan utuk memecahkan masalah (Rangkuti, 2001:14). SWOT merupakan singkatan dari *strengths* (kekuatan-kekuatan), *weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *opportunities* (peluang-peluang) dan *threats* (ancaman-ancaman). Dengan demikian, peneliti menggunakan analisis SWOT ini karena SWOT merupakan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melakukan strategi. Implementasi SWOT sangat bergantung dengan situasi dan kondisi, baik itu situasi kondisi internal maupun eksternal dan setiap organisasi pasti mempunyai empat unsur tersebut di atas.

Formulasi strategi dimulai dengan kegiatan analisis situasional (*Situational analysis*) yaitu suatu proses untuk menemukan kecocokan strategi antara peluang yang ada di lingkungan eksternal organisasi dengan kekuatan internal yang dimiliki organisasi.

a. *Internal Factor Analysis Strategy (IFAS)*

Langkah pertama dalam analisis SWOT tak lain diarahkan kedalam diri organisasi itu sendiri. Langkah penyimpulan dalam mengelola lingkungan internal dapat dipakai dalam menyusun IFAS matrik. Alat perumusan strategi ini menyimpulkan dan mengevaluasikan kekuatan dan kelemahan yang besar dalam daerah fungsional perusahaan dan juga memberikan suatu basis bagi pengidentifikasian dan pengevaluasian hubungan di antara daerah-daerah tersebut. *Intuitive judgement* sangat diperlukan dalam penggunaan IFAS matrik ini. Tahap pengembangan IFAS matrik adalah pembuatan faktor strategis lingkungan internal yang mencakup perihal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

b. *External Factor Analysis Strategy (EFAS)*

Langkah selanjutnya dalam analisis SWOT setelah identifikasi kondisi internal adalah analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. EFAS menggunakan matrik untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, teknologi dan informasi tentang persaingan. Tahap dalam mengembangkan EFAS matrik adalah sebagai berikut. Pembuatan faktor strategis lingkungan eksternal yang mencakup perihal: peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

c. Matriks SWOT

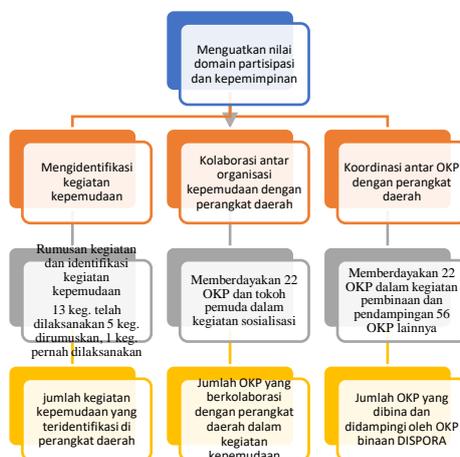
Matrik SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi keempat faktor yang tercakup dalam analisis yang menggambarkan kecocokan paling baik di antaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik SWOT digunakan untuk mengembangkan empat tipe alternatif strategi yaitu SO (*strengths-opportunities*), strategi WO (*weaknesses- opportunities*), strategi ST (*strengths-threats*), dan strategi WT (*weaknesses- threats*). Selanjutnya dilakukan Analisis Kuadran Strategi.

Setelah melakukan penyusunan matriks IFAS-EFAS, maka selanjutnya dilakukan analisis kuadran strategi faktor IFAS digambarkan dalam sumbu mendatar atau sumbu X, dan faktor EFAS digambarkan dalam sumbu vertikal atau sumbu Y. Bagian positif dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y ditempati kekuatan dan peluang, sedangkan bagian negatif dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y ditempati kelemahan dan ancaman.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan diperoleh hasil bahwa strategi yang tepat ada pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan yang agresif. Dengan posisi yang berada di kuadran ini berarti strategi yang sesuai adalah langkah pengembangan strategi S-O. Adapun langkah pengembangan strategi S-O Penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan kegiatan yang mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, dan berpendapat dalam forum kemasyarakatan.
2. Kolaborasi antara pemuda dan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan dan forum kemasyarakatan.

Koordinasi dengan organisasi kepemudaan dalam penguatan kelembagaan terkait batasan usia pemuda 16-30 tahun



**Gambar 1. Peta Hasil Analisa Rumusan Strategi Penguatan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**  
Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2021

#### D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI / CONCLUSION AND RECOMMENDATION

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Edward III, variabel-variabel yang digunakan oleh Edward III dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah:

Kebijakan pembangunan pemuda telah berhasil diimplementasikan walaupun belum optimal, sumberdaya manusia cukup dalam jumlah akan tetapi perlu peningkatan dalam hal kompetensi. Sedangkan sumberdaya anggaran termasuk kecil, akan tetapi sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik sesuai, dan perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan ini sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Personil perangkat daerah berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan pembagunan pemuda dan mereka telah mendapatkan insentif yang sesuai dengan tupoksinya. Perangkat daerah rata-rata belum memiliki SOP khusus layanan kepemudaan, dan urusan kepemudaan memiliki dimensi fragmentasi sehingga diperlukan koordinasi lintas sector.

2. Penyebab rendahnya domain partisipasi dan kepemimpinan di Kota Sukabumi di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Potensi dan motivasi pemuda dalam berorganisasi sudah cukup tinggi, namun batasan usia pemuda dalam UU No.40 tahun 2009 yaitu 16-30 tahun menjadikan potensi tersebut tidak

- dapat dihitung sebagai partisipasi secara utuh, hanya 28% dari OKP yang terbentuk yang dapat dihitung sebagai partisipasi pemuda dalam berorganisasi.
- b. Potensi dan minat pemuda untuk terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan sudah cukup tinggi, namun perlu adanya media komunikasi yang mudah diakses oleh pemuda.
  - c. Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan masih terbatas pada kegiatan musrenbang kelurahan. Pemerintah belum secara maksimal menyediakan ruang bagi para pemuda untuk menyampaikan pendapatnya.
3. Hasil analisis SWOT dengan analisis kuadran ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menguatkan domain partisipasi dan kepemimpinan di Kota Sukabumi, di antaranya adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan kegiatan yang mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berpendapat dalam forum kemasyarakatan.  
Mengidentifikasi kegiatan kepemudaan dalam rangka penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda merupakan strategi yang perlu dilakukan, selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut menjadi database dalam merumuskan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diusulkan penganggarnya.
  - b. Kolaborasi antar pemuda dan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan dan forum kemasyarakatan.  
Perangkat daerah pengampu kegiatan dapat memberdayakan 22 OKP binaan DISPORA dan juga tokoh-tokoh pemuda dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan.
  - c. Koordinasi dengan organisasi kepemudaan dalam penguatan kelembagaan terkait batasan usia pemuda 16-30 tahun.

Dapat dilakukan dengan pembinaan dan pendampingan kepada organisasi kepemudaan. DISPORA sebagai *leading sector* layanan kepemudaan dapat memberdayakan 22 OKP hasil binaannya sebagai pendamping bagi 56 OKP yang belum memenuhi standar OKP berdasarkan UU No.40 tahun 2009.

### Rekomendasi

Pelaksanaan penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi supaya lebih optimal sehingga memberi pengaruh positif terhadap kinerja para pelaksana kebijakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembangunan pemuda di Kota Sukabumi
  - a. Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan pemuda hingga di kelurahan. Dilakukan oleh Dispora.
  - b. Menyusun draft perwal tentang koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan. Dilakukan oleh Bappeda.
  - c. Menyusun draft SOP pelaksanaan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan. Dilakukan oleh Dispora.
2. Faktor rendahnya nilai domain partisipasi dan kepemimpinan
  - a. Menjalin kemitraan dengan 22 OKP binaan Dispora. Dilakukan oleh Dispora.
  - b. Membentuk WA grup dan Instagram sebagai media komunikasi bersama. Dibuatkan dan dikelola oleh Dispora.
  - c. Menyelenggarakan *youth planner*/rembuk pemuda dan melibatkan mereka dalam pelaksanaan FPD dan musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

3. Strategi penguatan domain partisipasi dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan pembangunan pemuda
  - a. Mengidentifikasi kegiatan kepemudaan dari perangkat daerah pengampu. Dilakukan oleh Bappeda.
  - b. Memberdayakan 22 OKP binaan dalam kegiatan pendampingan terhadap 56 OKP lainnya. Dilaksanakan oleh Dispora.
  - c. Menyusun draft kepal tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan. Dibuatkan oleh Bappeda.

## REFERENSI/ REFERENCE

- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Mulyadi, Deddy dan Hendrikus T. Gedeona. 2017. *Demokrasi, Governance, dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik: memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan proses kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Irwan, dkk. 2019. *Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Jurnal Moderat*. Vol. 5 No. 1 Februari 2019.
- Pinilas, Rifaldi, Ronny Gosal, dan Ventje Kasenda. 2017. *Partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No.2 2017.
- Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Peraturan Presiden No.66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2019 tentang Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.
- Bappeda. 2019. *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Sukabumi Tahun 2019*. Sukabumi: Bappeda Kota Sukabumi.
- Bappenas. 2017. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Jakarta: Bappenas
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.
- Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.